BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang padat dan berada di peringkat keempat dunia. Berdasarkan situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia (2024), populasi Indonesia di tengah tahun 2024 mencapai 281.603.800 jiwa. Jumlah penduduk ini mengalami kenaikan dari pertengahan tahun 2023 sebanyak 2.907.600 jiwa. Pertumbuhan penduduk yang pesat, terutama di daerah kota besar menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah. Peningkatan jumlah penduduk tanpa disertai pengembangan sarana dan prasarana yang cukup dapat menyebabkan berbagai permasalahan seperti kemiskinan, kriminalitas, bahkan munculnya pengangguran.

Pengangguran menurut BPS (2024) adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, merencanakan sebuah usaha, diterima bekerja atau ingin mencoba, tetapi belum memulai usaha, atau merasa putus asa untuk mendapatkan pekerjaan. Salah satu negara berkembang yang memiliki permasalahan pengangguran dan belum terselesaikan adalah Indonesia. Rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya keterampilan khusus, kurangnya kesempatan atau lapangan kerja, dan faktor-faktor lainnya menjadi penyebab terjadinya pengangguran (Setyaningsih et al., 2021). Sementara itu, menurut Anggoro & Soesatyo (2015) dalam 'Izzah & Hertati (2024) pengangguran terjadi karena disebabkan tingginya jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan pertumbuhan lapangan kerja dan peningkatan tenaga kerja yang tersedia kurang

memadai, hal ini dikarenakan rendahnya pertumbuhan penciptaan lapangan kerja dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang siap kerja.

Tabel 1. 1 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Februari 2020-2025

Keadaan Ketenagakerjaan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Penduduk Usia Kerja (PUK)	202,597	205,360	208,544	211,588	213,997	216,785
Angkatan Kerja	140,218	139,810	144,014	146,621	149,373	153,049
1. Bekerja	133,292	131,064	135,611	138,632	142,179	145,771
2. Pengangguran	6,925	8,746	8,402	7,989	7,194	7,278
Bukan Angkatan Kerja	62,378	65,550	64,530	64,967	64,623	63,736
Juta Orang per Februari						

Sumber : BPS Indonesia, 2025

Berdasarkan data BPS pada bulan Februari 2025, angka pengangguran di Indonesia mencapai 7,278 juta orang dari 145,771 juta penduduk yang bekerja. Individu yang telah mencapai usia diatas 15 tahun dikategorikan sebagai Penduduk Usia Kerja (PUK). Seiring dengan meningkatnya populasi di Indonesia, PUK pun cenderung meningkat. Pada Februari 2025, PUK sebanyak 216,785 juta orang atau 2,78 juta lebih banyak dibandingkan pada bulan Februari tahun 2024. Mayoritas penduduk usia kerja sebanyak 153,049 juta yang termasuk angkatan kerja, dan sisanya adalah 63,74 juta orang yang bukan angkatan kerja. Menurut Hermawan dalam (Khofifah & Winarni, 2024) banyaknya jumlah penduduk usia produktif, yang kadang disebut sebagai “bonus demografi”, meningkatkan terjadinya pengangguran. Faktanya, bonus demografi juga dapat menimbulkan risiko pengangguran di Indonesia, maka angka pengangguran di Indonesia akan meningkat. Selain itu, mengingat lapangan kerja yang tersedia saat ini tidak mencukupi untuk seluruh penduduk usia produktif.

Permasalahan terkait pengangguran terus menjadi suatu isu yang tidak akan pernah selesai dan menimbulkan tantangan baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Faktor yang menyebabkan pengangguran yaitu kurangnya keterampilan atau kemampuan pencari kerja yang tidak memenuhi persyaratan dunia kerja serta pendidikan yang dimiliki tidak sejalan dengan persyaratan posisi yang ditawarkan. Selain itu, banyak calon karyawan yang belum terserap ke dunia bisnis secara maksimal. Minat terhadap beberapa industri yang dianggap sederhana juga masih kurang (Yulinda et al., 2021). Permasalahan tersebut semakin nyata ketika pada pertengahan hingga akhir tahun 2024 terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang cukup besar di berbagai sektor. Fenomena ini menunjukkan bahwa ketidakpastian ekonomi dan dinamika dunia kerja masih menjadi tantangan serius dalam menciptakan ketenagakerjaan yang stabil dan berkelanjutan.

Tabel 1. 2 Tenaga Kerja Ter-PHK Juli-Desember

Jumlah Tenaga Kerja Ter-PHK Juli-Desember Tahun 2023-2024 (dalam ribu)		
Bulan	2023	2024
Agustus	37.375	46.240
September	42.277	54.400
Oktober	45.576	63.947
November	57.923	67.870
Desember	64.855	77.965

Sumber : Data Kemnaker 2023 dan 2024

Berdasarkan data pada gambar 1.2 jumlah tenaga kerja yang terkena PHK sepanjang pertengahan tahun 2024 terus mengalami peningkatan. Pada Desember tahun 2024, tercatat sebanyak 77.965 tenaga kerja yang terkena PHK. Sejak tahun lalu dan bulan sebelumnya, jumlah saat ini mengalami peningkatan. Berdasarkan

data, jumlah PHK pada Desember 2024 meningkat sebanyak 13.110 orang dibandingkan pada Desember 2023. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker menyatakan bahwa sektor bisnis yang melakukan PHK paling banyak yaitu pengolahan industri sebanyak lebih dari 28 ribu tenaga kerja. Kemudian lebih dari 15 ribu tenaga kerja yang di PHK dari sektor aktivitas jasa. Terakhir PHK terbanyak dari sektor perdagangan atau ritel sebanyak 8 ribu lebih tenaga kerja (Dwi, 2024). Kemnaker dalam situs Satu Data Kemnaker mengatakan bahwa :

“Tenaga kerja ter-PHK paling banyak terdapat di Provinsi DKI Jakarta yaitu sekitar 21,91 persen dari jumlah tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan” (detikFinance, 2024) <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7744338/jakarta-darurat-phk-korbannya-tembus-17-ribu>

Berdasarkan data dari Satu Data Kemnaker, DKI Jakarta menjadi provinsi tertinggi yang terkena PHK pada tahun 2024. Data bulan Desember 2024, DKI Jakarta menjadi daerah dengan PHK tertinggi di Indonesia sebanyak 17.085 orang. Berbeda dengan tahun sebelumnya, Jawa Barat menempati posisi pertama dengan angka PHK tertinggi di Indonesia sebanyak 17.545 tenaga kerja.

Tabel 1. 3 Penduduk DKI Jakarta 2024

Penduduk DKI Jakarta Jakarta Semester 2 Tahun 2024	
Kota Jakarta Timur	3,230,417 Jiwa
Kota Jakarta Barat	2,556,752 Jiwa
Kota Jakarta Selatan	2,331,411 Jiwa
Kota Jakarta Utara	1,832,032 Jiwa
Kota Jakarta Pusat	1,057,270 Jiwa
Kab. Kepulauan Seribu	30,334 Jiwa

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi salah satu provinsi dengan populasi terbesar di Indonesia. Provinsi DKI Jakarta sebagai kota metropolitan

yaitu kota terbesar di Indonesia dan pusat perekonomian serta Ibukota Indonesia tentunya menjadi penyebab meningkatnya jumlah penduduk di Jakarta. Perumbuhan penduduk yang terus meningkat mengakibatkan meningkatnya lonjakan angkatan kerja, tetapi ketersediaan lowongan pekerjaan tidak mampu menampung semua angkatan kerja, sehingga menyebabkan pengangguran (Putri & Wahyudi, 2024). Menurut (Frisnoiry et al., 2024) pertumbuhan penduduk setiap tahun meningkatkan jumlah pencari kerja, sehingga menambah tekanan pada ketersediaan lapangan pekerjaan. Selain itu, adanya ketidakseimbangan antara banyaknya angkatan kerja dan ketersediaan lowongan pekerjaan mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran terbuka. Kondisi ini dipengaruhi faktor lain seperti masalah ekonomi, kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada masyarakat, pembangunan sektor ekonomi yang tidak selaras dengan kebutuhan, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, serta terbatasnya peluang kesempatan kerja.

Provinsi DKI Jakarta termasuk salah satu contoh kota di Indonesia yang sedang menghadapi permasalahan serius yaitu meningkatnya angka pengangguran. DKI Jakarta, sebagai pusat ekonomi Indonesia, tentunya memiliki tantangan tersendiri dalam mengatasi masalah pengangguran, terutama pengangguran terbuka. Permasalahan pengangguran ini memiliki perbedaan jenis. Menurut Sadono Sukirno (1994) mengemukakan bahwa dalam mengklasifikasikan tipe pengangguran, terdapat dua cara pengelompokan yakni berdasarkan faktor penyebab pengangguran dan karakteristik pengangguran. Berdasarkan penyebab terjadinya pengangguran, maka pengangguran dibedakan menjadi empat jenis yaitu

friksional atau normal, siklikal, struktural, dan teknologi. Sementara itu, dalam pengangguran berdasarkan cirinya, dibedakan menjadi pengangguran terbuka, tersembunyi, musiman, dan setengah menganggur. Berdasarkan *An International Labor Organization (ILO) Manual on Concept and Method* dalam Salsabila et al. (2023) pengangguran terbuka merupakan angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan atau tidak bekerja serta tidak mencari pekerjaan karena merasa peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya sangat kecil. Hal ini menjadikan tingkat pengangguran terbuka digunakan sebagai ukuran presentase pengangguran dalam angkatan kerja (Sarinanto & Nawawi, 2024).

Tabel 1. 4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2021-2025

Wilayah	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)							
	2021	2022		2023		2024		2025
	Agt	Feb	Agt	Feb	Agt	Feb	Agt	Feb
DKI Jakarta	8,50	8,00	7,18	7,57	6,53	6,03	6,21	6,18

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2025

Jika dilihat dari persentase diatas Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2021 hingga 2025, Provinsi DKI Jakarta termasuk provinsi dengan angka pengangguran terbuka paling tinggi di Indonesia. Berdasarkan data BPS 2025, presentase TPT di DKI Jakarta berada di atas TPT nasional sebesar 4,76 persen. Meskipun pengangguran terbuka menunjukkan ke arah penurunan dari tahun ke tahun, posisi DKI Jakarta masih menempati peringkat enam dalam jumlah penangguran dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Dengan demikian, DKI Jakarta masih harus melakukan upaya lebih dalam mengatasi angka pengangguran terbuka. Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun

2020 pemerintah berupaya mengatur cipta kerja dengan tujuan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang luas di Indonesia. Selain itu, UU ini menjadi landasan hukum untuk menghadapi tantangan dalam kondisi kompetisi yang ketat dan tekanan dari globalisasi perekonomian. DKI Jakarta memiliki tiga konsep utama dalam mengatasi pengangguran terbuka yaitu dengan mengintegrasikan secara pemerintah provinsi dan nasional yaitu menyelaraskan institusi pendidikan yang memiliki angkatan kerja dengan lapangan kerja, membuat balai latihan kerja untuk menginformasikan kesempatan kerja melalui informasi pasar kerja, dan juga menjamin perlindungan ketenagakerjaan. Konsep utama ini sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan yaitu UU Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Keselamatan Kerja. Fenomena pengangguran terbuka di DKI Jakarta menjadi persoalan yang tidak bisa diabaikan, terlebih sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan. Meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan, tantangan dalam mengatasi angka pengangguran masih terus berlangsung.

Tabel 1. 5 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja DKI Jakarta 2023-2025

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Februari 2022	Februari 2023	Februari 2024
Penduduk Usia Kerja (PUK)	8.333,26	8.339,08	8.373,46
Angkatan Kerja	5.255,24	5.434,38	5.476,00
1. Bekerja	4.857,62	5.106,78	5.137,60
2. Pengangguran	397,62	327,60	338,39

Sumber : BPS DKI Jakarta Agustus 2025

Provinsi DKI Jakarta seharusnya mampu menjadi wilayah dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Namun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2025 menunjukkan bahwa TPT di DKI Jakarta masih tergolong tinggi, menempati posisi keenam secara nasional. Hal ini menunjukkan

adanya kesenjangan antara potensi ekonomi dan angkatan kerja DKI Jakarta dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Berdasarkan data dari Kemnaker dalam (Hidayat, 2025) tahun 2024 tercatat bahwa terdapat 61 ribu lowongan pekerjaan di Provinsi DKI Jakarta, namun hanya 35 ribu jumlah pencari kerja yang terdaftar. Namun, meskipun terdapat banyak lowongan, masih ada tenaga kerja yang belum terserap. Kesenjangan ini mencerminkan permasalahan ketenagakerjaan di DKI Jakarta, khususnya terkait pengangguran terbuka. Kondisi ini menyatakan bahwa permasalahan utama bukan hanya jumlah lapangan pekerjaan, tetapi juga ketidaksesuaian antara kualifikasi tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Andrian menyatakan bahwa faktor penyebab pengangguran di DKI Jakarta disebabkan oleh lulusan yang dihasilkan tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan (DPRD Provinsi DKI Jakarta, 2024). Asisten perekonomian dan keuangan Sekretariat daerah Provinsi DKI Jakarta menjelaskan bahwa ada beberapa tantangan yang sedang dihadapi. Diantaranya adalah tidak sesuainya antara jumlah tenaga kerja dengan kebutuhan pasar, banyak tenaga kerja yang ada di sektor informal, dan juga kebutuhan tenaga kerja yang mengandalkan teknologi yang terus mengalami peningkatan (DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, 2024).

Permasalahan pengangguran terbuka adalah tantangan bersama yang perlu ditangani oleh semua pihak terkait baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta masyarakat. Upaya dalam mengatasi pengangguran terbuka di DKI Jakarta tentunya tidak lepas dari dasar hukum yang berlaku. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjadi landasan

utama dalam perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja di Indonesia. Undang-undang ini menjelaskan tentang hak dan kewajiban tenaga kerja serta peran pemerintah dan dunia usaha dalam menciptakan hubungan kerja yang sehat dan saling menguntungkan. Kemudian, aturan tersebut diperkuat melalui Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 mengenai Ketenagakerjaan. Peraturan ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menyusun kebijakan ketenagakerjaan yang sejalan dengan kebijakan nasional, termasuk dalam hal pemberdayaan, pelatihan, dan penempatan tenaga kerja di wilayah DKI Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam memperluas kesempatan kerja bagi masyarakatnya.

Bentuk adaptasi terhadap tantangan global dan kebutuhan pembangunan daerah yang semakin kompleks, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga mengeluarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 24 Tahun 2020 mengenai Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta (*Jakarta Development Collaboration Network*). Pada peraturan ini, ditekankan bahwa pembangunan Jakarta perlu melibatkan partisipasi lintas sektor, dari masyarakat, akademisi, pemerintah, dan swasta. Pendekatan kolaboratif ini menunjukkan bahwa kolaborasi antarpihak sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan-masalahan besar seperti pengangguran terbuka. Pada permasalahan pengangguran terbuka, dibutuhkan suatu bentuk kolaborasi yang disebut dengan *collaborative governance*. Ansell and Gash (2007) menyatakan *collaborative governance* adalah suatu cara dalam mengelola pemerintah atau lembaga publik dengan melibatkan berbagai kepentingan yaitu pihak swasta dalam proses pengambilan keputusan dengan

formal, berbasis keputusan bersama, dan mempertimbangkan berbagai aspek, yang bertujuan untuk membuat atau melaksanakan kebijakan maupun program publik yang lebih baik. Ansell dan Gash dalam proses kolaborasi terdiri dari *face to face dialogue*, *trust building*, *commitment to the process*, *shared understanding*, dan *intermediate outcomes*. Adanya kolaborasi ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan pengangguran terbuka di DKI Jakarta secara efektif dan berkelanjutan. Namun, keberhasilan kolaborasi sangat bergantung pada adanya komitmen, kepercayaan, dan pemahaman bersama yang kuat antara seluruh *stakeholders* yang berpartisipasi (Maharani & Abubakar, 2024). Berdasarkan informasi yang didapatkan dari kepala seksi informasi pasar kerja Disnakertransgi DKI Jakarta menyatakan bahwa salah satu kesenjangan permasalahan kegagalan dalam mendapatkan pekerjaan di Provinsi DKI Jakarta yaitu kurangnya pemahaman dari pencari kerja mengenai syarat pendaftaran kerja mengenai *curriculum vitae* (CV) dan sistem *Applicant Tracking System* (ATS) serta kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan.

Berdasarkan penelitian T. L. Huki et al. (2024) mengenai *Collaborative Governance* Dalam Menangani Masalah Pengangguran Terbuka Di Kota Pangkalpinang menemukan hasil penelitian bahwa kolaborasi yang dilakukan sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari berbagai cara kolaborasi yang telah dilakukan, antara lain: kolaborasi pemerintah dengan masyarakat melalui *job fair* tahun 2022 dan program pendidikan dan pelatihan, kolaborasi pemerintah dengan akademisi yaitu melalui program kesempatan kerja berbasis kawasan, dan terakhir kolaborasi pemerintah dengan swasta yaitu memberikan kemudahan perizinan

penanaman modal perizinan melalui proses digitalisasi. Penelitian serupa juga dilakukan oleh (Hasibuan & Herman, 2024) mengenai *Collaborative Governance* Dalam Mengatasi Pengangguran Di Kabupaten Bengkalis. Namun, dalam penelitiannya masih ditemukan kendala yaitu rendahnya partisipasi perusahaan, minimnya anggaran, serta jumlah perusahaan yang terbatas menjadi hambatan dalam *Collaborative Governance* untuk mengatasi masalah pengangguran di Kabupaten Bengkalis.

Kolaborasi dalam upaya mengatasi angka pengangguran terbuka di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Provinsi DKI Jakarta melibatkan sejumlah aktor penting yang memiliki peran strategis. Aktor-aktor tersebut antara lain Disnakertransgi Provinsi DKI Jakarta sebagai pemangku kebijakan, sektor swasta seperti perusahaan-perusahaan baik yang tergabung dalam asosiasi pengusaha atau tidak, serta institusi pendidikan yang berperan dalam penyediaan sumber daya manusia. Perusahaan memiliki peran utama dalam menyediakan lapangan kerja dan menyampaikan informasi terkait kebutuhan tenaga kerja kepada pemerintah. Oleh karena itu, adanya keterlibatan sektor swasta sangat penting agar peluang kerja dapat lebih terbuka dan terserap dengan maksimal dan berkontribusi dalam menekan angka pengangguran terbuka di DKI Jakarta. Sementara itu, institusi pendidikan berperan dalam menyiapkan lulusan atau tenaga kerja yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan industri yang terus berkembang. Adapun bentuk kolaborasi yang dilakukan Disnakertransgi DKI Jakarta meliputi kolaborasi penyediaan informasi pasar kerja, kolaborasi pelatihan kerja, dan kolaborasi program kewirausahaan terpadu. Kolaborasi tidak hanya dilakukan

secara umum dengan sektor swasta dan institusi pendidikan, tetapi juga secara khusus melalui kerja sama dengan organisasi seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta.

Upaya mengatasi pengangguran terbuka di Provinsi DKI Jakarta oleh Disnakertransgi menunjukkan adanya perbedaan kondisi sebelum dan sesudah penerapan kolaborasi dengan melibatkan sektor swasta dan masyarakat. Sebelum diterapkan kolaborasi, kebijakan atau program yang dibuat untuk mengatasi angka pengangguran terbuka oleh pemerintah tanpa keterlibatan aktif dari dunia usaha dan asosiasi industri. Hal ini menyebabkan ketidaseimbangan antara kebutuhan pasar kerja dengan kompetensi pencari kerja. Namun, setelah adanya kolaborasi antara Disnakertransgi dengan Apindo DKI Jakarta dan Kadin DKI Jakarta maka pelatihan kerja disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri saat ini. Selain itu, mereka juga saling bertukar informasi soal lowongan dan kebutuhan pasar kerja. Bentuk kerja sama seperti ini membuat hubungan antara pemerintah dan pelaku usaha jadi lebih baik, program-program ketenagakerjaan jadi lebih tepat sasaran, dan secara perlahan membantu menurunkan angka pengangguran terbuka di DKI Jakarta.

Bentuk kolaborasi yang dilakukan antara Pemprov DKI Jakarta yaitu menciptakan program magang, pelatihan, serta peluang kerja yang lebih luas bagi warga DKI Jakarta. Kerja sama dengan Kadin DKI Jakarta diwujudkan dalam pembentukan Tim Kerja Daya saing Vokasi (TKDV) atau Komite Vokasi, yang bertujuan untuk menjadi penghubung kebutuhan dunia industri dengan lulusan dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan. Sementara itu, kerja sama dengan

Apindo DKI Jakarta mencakup pertukaran informasi pasar kerja dan pelaksanaan pelatihan kerja yang relevan dengan perkembangan saat ini. Hal ini terlihat dalam acara rapat *Training Need Analysis* yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah (PPD) Provinsi DKI Jakarta, yang mana Apindo DKI Jakarta dan Kadin DKI Jakarta menekankan pentingnya pelatihan yang diberikan kepada tenaga kerja perlu disesuaikan dengan perkembangan industri, khususnya dalam hal teknologi digital dan otomatisasi (Jakarta, 2024). Pada pelaksanaan kolaborasi dalam upaya mengatasi angka pengangguran terbuka di DKI Jakarta tetap dilakukan tanpa menunggu terbitnya *Memorandum of Understanding* (MoU). Hal ini dikarenakan jika pelaksanaan menunggu MoU, maka prosesnya akan memerlukan waktu yang lama, sementara permasalahan pengangguran terbuka membutuhkan penanganan segera. Oleh karena itu, proses kolaborasi tetap dijalankan sambil menunggu MoU diterbitkan agar memastikan efektivitas dan keberlanjutan program dalam mengatasi pengangguran terbuka di DKI Jakarta.

Saat ini, kolaborasi juga dilakukan dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta. Kolaborasi antara Jakarta Experience Board (JXB) atau PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) dengan Disnakertransgi merupakan salah satu cara dalam mengurangi tingkat pengangguran terbuka di DKI Jakarta. Selain itu, terdapat bentuk kolaborasi yang dilakukan antara Pemprov DKI Jakarta dengan Kementerian Ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan acara Jaknaker Expo 2024. Selain itu, Disnakertransgi juga berkolaborasi dengan Universitas Trisakti dengan mengadakan acara *job fair* Jakarta Goes to Campus di Universitas Trisakti.

Pelaksanaan *job fair* atau Jaknaker di Jakarta sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 yaitu mengenai ketenagakerjaan. Tentunya kegiatan Jaknaker memberikan keuntungan bagi semua pihak, baik masyarakat yang mencari pekerjaan, perusahaan, dan juga pemerintah. Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan Jaknaker Expo 2024 terdapat 35.000 lowongan kerja dari 43 perusahaan. Selain itu, masyarakat juga bisa mendatangi 33 stan pameran kewirausahaan, serta menunjukkan pameran UPT di lingkungan Disnakertransgi Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, penulis tertarik ingin melakukan penelitian mengenai *Collaborative Governance* Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi permasalahan pengangguran terbuka. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis *collaborative governance* yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan swasta dalam mengatasi angka pengangguran dengan menggunakan teori *collaborative governance* Ansell dan Gash. Oleh karena itu, judul yang diambil dalam penelitian ini yaitu “***Collaborative Governance* dalam Mengatasi Angka Pengangguran Terbuka di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan data yang telah disebutkan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana *Collaborative Governance* dalam Mengatasi Angka Pengangguran Terbuka di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis *collaborative governance* dalam upaya mengatasi angka pengangguran terbuka di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dalam mengembangkan konsep tentang *collaborative governance* dalam mengatasi angka pengangguran terbuka di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis berupa saran dan menjadi sumber referensi bagi para pembaca, terutama :

1. Bagi penulis

Penelitian ini dijadikan syarat dalam memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Administras Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur serta untuk mengetahui tentang *collaborative governance* dalam mengatasi angka pengangguran terbuka di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta.

2. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk referensi bagi akademis serta menambah pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa yang lingkup penelitiannya berkaitan dengan Ilmu Administrasi Publik khususnya mengenai *collaborative governance* dalam mengatasi angka pengangguran.

3. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi, masukan, atau kontribusi terkait *collaborative governance* dalam mengatasi angka pengangguran terbuka di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta.